



**JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**  
*Journal of Environmental Education and Sustainable  
Development*

Volume 25 - Nomor 01, 2024

Available at <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>

ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs (Pilar Pembangunan Lingkungan) di Kabupaten Bojonegoro

Tarjibu Azizatul Laili<sup>1\*</sup>, Ahmad Taufiq<sup>1</sup>, Henny Suhindarno<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bojonegoro,

\*Coressponding author email: [tarjibu71@gmail.com](mailto:tarjibu71@gmail.com)

### Artikel info

Received : 25 Januari 2024

Revised : 21 Februari 2024

Accepted : 25 Maret 2024

### Kata kunci:

Perencanaan Pembangunan,  
Sustainable Development  
Goals (SDGs), Ruang  
Terbuka Hijau (RTH)

### Keywords:

Development Planning,  
Sustainable Development  
Goals (SDGs), Green Open  
Space

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem perencanaan pembangunan yang berbasis SDGs pada pilar pembangunan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan beberapa masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman yang terdapat tiga tahap analisis. Teori proses perencanaan yang dikemukakan oleh Berry (1993) dalam Mahi dan Trigunarso (2017) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, namun dengan adanya program pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa program tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan khususnya berpengaruh pada jumlah proporsi ruang terbuka hijau (RTH). Secara keseluruhan rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi prespektif dalam SDGs, terutama pada pilar pembangunan lingkungan.

### ABSTRACT

*This research aims to find out and analyze how the SDGs-based development planning system on the environmental development pillar. This research uses descriptive qualitative research methods, data collected through interviews and observations at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), the Environmental Agency (DLH), and several communities directly affected by infrastructure development in Bojonegoro Regency. The data analysis method was carried out using the Miles and Huberman method, which has three stages of analysis. The theory of the planning process proposed by Berry (1993) in Mahi and Trigunarso (2017) was used in this study. The results showed that infrastructure development planning has been carried out in Bojonegoro Regency, but the existence of infrastructure development programs shows that these programs affect environmental conditions, especially affecting the proportion of green open space (RTH). Overall, the infrastructure development plan in Bojonegoro Regency has not fulfilled the perspectives in the SDGs, especially in the environmental development pillar.*

<https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.43148>

**How to Cite:** Laili Tarjibu. A, Taufiq. A & Suhindarno. H. (2024). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs (Pilar Pembangunan Lingkungan) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 25(01), 25-40 .doi: <https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.43148>

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan rakyat dengan melalui penerapan kebijakan untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan efektif. Di setiap negara pembangunan hal yang penting untuk dilaksanakan karena adanya pembangunan akan tercipta kesejahteraan masyarakat, dan juga akan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan segala aktivitas. Langkah-langkah dalam perencanaan yang dilakukan harus dilakukan dengan maksimal untuk mewujudkan pembangunan yang baik, dan dengan adanya perencanaan yang baik dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan. Ini sesuai dengan pernyataan (Todaro, +2006; Pembangunan et al., 2017) bahwa kegagalan dalam pembangunan disebabkan oleh kesalahan dalam proses perencanaan sebelumnya, dan perencanaan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan.

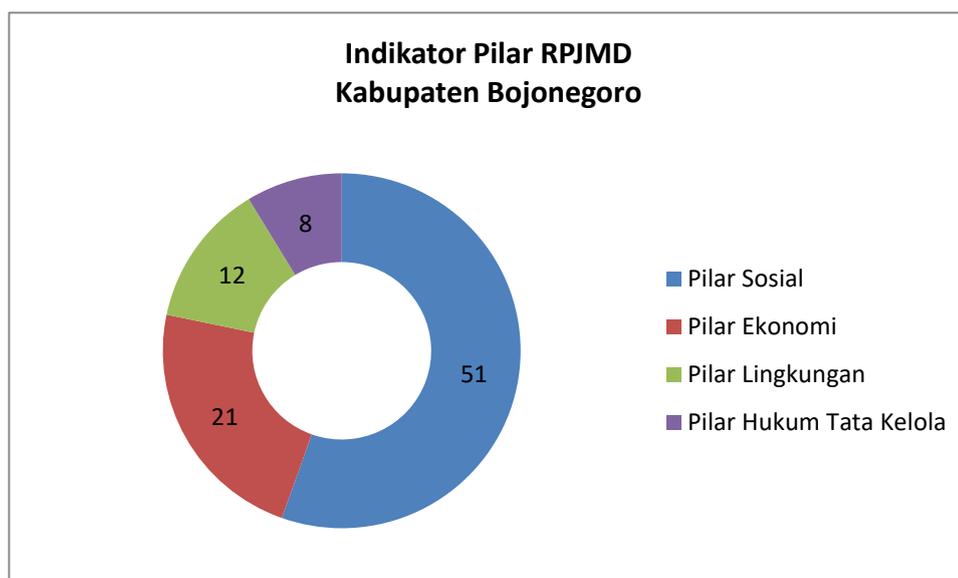
Suatu kebijakan dalam pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD diperlukan untuk membuat perencanaan pembangunan yang efektif. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman kerja untuk pembangunan daerah selama 5 tahun, dan berisi penjabaran visi misi serta program kepala daerah. Penyusunan dokumen perubahan RPJMD di Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen salah satunya yaitu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS yang perubahannya dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk mengkaji atau menilai dampak lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan..

Dokumen RPJMD pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan adalah salah satu dari banyak misi yang akan dilaksanakan. Untuk membangun misi ini sangat dipengaruhi oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBH) atau Sustainable Development Goals (SDGs), dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini memastikan bahwa wilayah tersebut dapat berkembang dengan baik di masa depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBH) atau SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan dan termasuk beberapa pilar didalamnya.

SDGs juga merupakan komitmen global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui kerja sama global yang erat dengan solidaritas yang tinggi (Ridlwani, n.d.)

Hasil analisis keterkaitan (cross-cutting) dan pembagian kewenangan menunjukkan bahwa SDGs yang terdapat 17 tujuan didalamnya dan terdiri dari 220 indikator yang berada dibawah kewenangan pemerintah kabupaten, SDGs yang relevan dengan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 16 tujuan yang terdiri dari 209 indikator, dari 209 indikator tersebut yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro sebanyak 92 indikator SDGs dan terbagi menjadi 4 pilar.

D



Gambar 1. Bagian Indikator Pilar RPJMD Kabupaten Bojonegoro

Dari 92 indikator SDGs yang berkaitan dengan RPJMD terdapat beberapa capaian indikator di Kabupaten Bojonegoro yaitu beberapa indikator yang telah dilaksanakan sudah mencapai target sebanyak 36 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target sebanyak 52 indikator, indikator yang belum dilaksanakan sebanyak 1 indikator, dan indikator yang tidak terdapat data sebanyak 2 indikator (Pemda Bojonegoro, n.d.).

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, adanya pembangunan ini dilakukan tidak hanya di kota saja tetapi juga sampai di pedesaan yang meliputi program pembangunan jalan di kota dan desa, pembangunan trotoar dan drainase pada perkotaan. Pemerintah melakukan program pembangunan ini untuk menata, mempercantik kawasan Bojonegoro. Dengan adanya pembangunan infrastruktur selain memiliki banyak manfaat positif bagi masyarakat, terdapat juga efek negatif terhadap lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menebang banyak pohon selama proses perencanaan pembangunan trotoar dan drainase, akibatnya ruang terbuka hijau (RTH) disepanjang jalan dikawasan perkotaan menjadi berkurang dan lebih jelas.

Menurut situs web Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2020), tahun 2019 pemerintah Bojonegoro telah membangun 24 taman kota dan kecamatan, termasuk 17 taman yang dibangun pada bidang tegak lurus di perkotaan dan 7 taman baru, bersama dengan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 telah membangun ruang terbuka hijau atau RTH sebanyak 6 yang berupa taman, dan Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan sekitar 120.000 pohon untuk ditanam. Dengan pembauatan 6 RTH dan penanaman pohon ini, pemerintah Bojonegoro berharap dapat mencapai target minimal pemenuhan proporsi RTH yang tertera dalam Undang-Undang. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk membangun RTH dan menanam pohon, jumlah RTH di Kabupaten Bojonegoro masih kurang dari target minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dari permasalahan tersebut termasuk pada SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan yang termuat dalam Goals SDGs ke 11 mengenai Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, dan merujuk pada indikator ka 11.7.1.9.(a) yang membahas tentang Proporsi Ruang Terbuka Perkoatan Untuk Semua. Menurut indikator ini, ruang terbuka perkotaan yang dimaksud adalah ruang publik, jalan, dan ruang disekitar jalan di wilayah perkotaan. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Kabupaten atau kota diwajibkan untuk membangun atau memiliki RTH sebanyak 30% dari luas wilayahnya, RTH ini terdiri dari 20% RTH (taman kota, taman rekayasa, hutan kota, jalur hijau sepanjang jalan dan sungai), dan 10% RTH privat (halaman rumah, halaman perkantoran, dan atap bangunan) (Bappenas, 2020).

Guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mempengaruhi aspek apa pun, proses perencanaan pembangunan memerlukan perencanaan yang sangat baik. Peneliti menggunakan teori Berry (1993) dalam Mahi dan Trigunarjo (2017) untuk menciptakan proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang baik, yang terdiri dari tujuh tahap perencanaan: diagnosis masalah, perumusan tujuan, proyeksi dan perkiraan, pengembangan alternatif, analisis kelayakan, evaluasi dan implementasi. Dengan teori ini proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik dan berkualitas tinggi (Afifah, 2019).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur terus meningkat setiap tahun, agar pembangunan berhasil dan mencapai tujuan, diperlukan proses perencanaan yang efektif. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan belum sesuai dengan teori perencanaan yang baik (Afifah, 2019). Adanya pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik telah berdampak pada kualitas lingkungan, terutama karena pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada penurunan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) (Rofi et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang peneliti menemukan masalah yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada ruang RTH di Bojonegoro. Tujuan dari penelitian adalah guna mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bojonegoro berbasis pada SDGs khususnya pada pilar pembangunan Lingkungan. Keterbaruan pada penelitian ini yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilihat dari SDGs pada pilar pembangunan lingkungan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan model penelitian deskriptif. Metode ini untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara rinci bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan, kemudian dideskripsikan dalam laporan penelitian yang menggambarkan tentang perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilihat dari perspektif lingkungan di daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara langsung dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan wawancara penelitian ini merupakan orang yang dianggap mengetahui permasalahan perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE) dan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro pada bidang tata lingkungan dan bidang persampahan dan RTH. Serta masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap reduksi data yang merupakan tahap penyederhanaan data yang sesuai dengan persyaratan untuk memudahkan akses ke data. Tahap penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang telah diolah sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Tahap penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah tahap penarikan simpulan dari data yang disusun.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan yang baik harus diawali dengan proses perencanaan yang baik. Untuk mewujudkan pembangunan yang baik maka proses perencanaan dalam penelitian ini mengacu pada lima indikator:

### **1. Identifikasi Masalah**

Suatu perencanaan pembangunan infrastruktur bisa terjadi karena adanya suatu ketidakpuasan masyarakat, maka dari itu proses identifikasi masalah menjadi tahap yang harus dilakukan segera karena dengan adanya tahap identifikasi masalah ini pemerintah bisa menemukan suatu alternatif atau terobosan untuk menanggulangi keluhan atau ketidakpuasan yang terjadi di masyarakat. Proses identifikasi masalah di Kabupaten Bojonegoro sendiri dilakukan dengan mendengarkan keluhan-keluhan dan observasi langsung pada permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah dapat mengkaji sehingga dapat mengeluarkan kebijakan program yang selaras dengan kebutuhan dan keluhan dari masyarakat.

Dibawah kepemimpinan Bupati Anna Mu'awanah, banyak program telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya adalah program pembangunan infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur adalah satu program unggulan untuk dilaksanakan. Program ini dilakukan karena berbagai alasan termasuk kualitas jalan yang rendah, yang menyebabkan masyarakat tidak nyaman dan rentan terhadap kecelakaan, kurangnya jalan penghubung atau jalan alternatif antar wilayah, dan tingkat kerusakan lingkungan hidup .

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

*“Dalam proses identifikasi, masalah yang muncul di Kabupaten Bojonegoro contohnya di jalan. Diponegoro dalam pembangunan trotoar dan drainase adalah kerap terjadinya banjir dikala curah hujan yang sedang tinggi dengan adanya trotoar dan drainase ini diharapkan dapat menanggulangi banjir yang terjadi. Dan diharapkan dengan adanya trotoar ini diharapkan bisa digunakan masyarakat untuk berjalan-jalan dengan nyaman.”*

Dengan adanya permasalahan yang timbul pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengatasi masalah pembangunan infrastruktur dengan berbagai cara, seperti menjalankan program meningkatkan interaksi dan intensitas wilayah, pengecoran jalan untuk meningkatkan kekuatan jalan, dan meningkatkan daya dukung dan pengendalian lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan mulai dari perkotaan hingga ke pelosok desa yang meliputi beberapa program peningkatan jalan dilakukan dengan cara pengecoran jalan dan pengaspalan kembali jalan yang dulunya rusak mulai dari jalan raya desa maupun jalan raya kota, program pembangunan pembangunan trotoar dan drainase dikawasan perkotaan.

Pembangunan trotoar dan saluran air adalah salah satu inisiatif di Kabupaten Bojonegoro karena beberapa masalah yang muncul. Sebelum pembangunan trotoar dan drainase, tidak sedikit masyarakat yang berjalan kaki mengeluh tentang kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki. Dengan tidak adanya trotoar juga dapat memengaruhi kelancaran lalu lintas di jalan raya karena pejalan kaki berjalan di sekitar jalan raya. Saat curah hujan tinggi, banjir terjadi di beberapa jalan perkotaan seperti jalan Diponegoro, jalan Pemuda, jalan Mastrip, jalan Panglima Sudirman. Ini disebabkan karena kurangnya saluran air di sekitar jalan raya, sehingga air menumpuk di tengah jalan raya dan mengganggu pengguna jalan raya yang akan melintas.

## **2. Perumusan Tujuan**

Dengan adanya permasalahan yang terjadi, pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut dan dengan adanya tujuan yang jelas dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Pada tahap perumusan ini, tujuan pemerintah harus selaras dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro pemerintah menetapkan tujuan yang selaras dengan permasalahan yang terjadi guna mengoptimalkan pembangunan agar pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Dari permasalahan yang timbul di Kabupaten Bojonegoro, dari wawancara yang telah dilakukan di BAPPEDA pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

*“Tujuan dari perencanaan pembangunan infrastruktur ini pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan dasar peraturan yang ada seperti RTRW. Proses yang dilakukan dalam perumusan tujuan yaitu bagaimana tinjauan kebijakan yang ada misalnya dengan peraturan tata ruang tata wilayah dan lain lainnya.”*

Pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Bojonegoro sesuai peraturan yaitu RTRW yang mempunyai tujuan mewujudkan ruang di Kabupaten Bojonegoro yang mampu mempertahankan pertanian, mengembangkan pariwisata, industri pertambangan, dan energi dengan cara yang selaras dengan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, hasil dari pengamatan dilapangan dan wawancara terhadap masyarakat, tujuan pembangunan infrastruktur ini memberikan pengaruh terhadap beberapa masyarakat, yaitu dengan dibangunnya Maliogoro di jalan MH. Tamrin masyarakat mulai berdatangan untuk berwisata. Dengan banyaknya masyarakat yang berdatangan di Maliogoro pemerintah secara tidak sengaja juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tak hanya masyarakat disekitar jalan MH. Tamrin masyarakat desa lain juga datang untuk berdagang di kawasan Maliogoro mulai dari berjualan makanan, hingga pernak-pernik untuk anak-anak, tak hanya para kalangan umur kepala 30 ke atas yang berdagang tak jarang juga kalangan umur kepala 20 an juga mulai berdagang di sekitar kawasan tersebut, para pemuda ini biasanya berdagang kopi dengan cara yang unik, yaitu berdagang kopi diatas motor, mereka membuat semacam tempat yang terbuat dari kayu diatas jok motor mereka yang digunakan untuk tempat kompor portabel, kopi dan ice kemasan.

Meskipun demikian, berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, masyarakat menganggap bahwa tujuan pembangunan dilihat dari segi lingkungan ini masih belum mencapai tingkat yang optimal. Masyarakat banyak yang mengeluh tentang pembangunan tersebut karena pohon-pohon yang semula rindang telah ditebang untuk pembangunan tempat dan trotoar yang dibangun di wisata Maliogoro dan yang membuatnya lebih panas. Akibat dari penebangan pohon yang dilakukan ditempat wisata Maliogoro pun banyak masyarakat yang berdatangan di malam hari, karena dengan sedikitnya pepohonan yang tersedia cuaca terasa lebih terasa menjadi panas saat siang hari sehingga masyarakat memilih datang di Maliogoro saat malam hari.

### **3. Proyeksi dan Perkiraan**

Setiap perencanaan pembangunan harus memperhitungkan bagaimana kondisi pembangunan yang telah dilakukan di masa depan, karena dengan perkiraan ini, pemerintah dapat mengatasi masalah yang muncul di masa depan. Selaras dengan tujuan perencanaan pembangunan yang dilakukan maka perencanaan pembangunan harus memperkirakan apakah tujuan pembangunan bisa tercapai atau tidak, pemerintah harus memperkirakan apakah perencanaan pembangunan ini bisa sesuai dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Pada Kabupaten Bojonegoro yang memiliki beberapa program yang dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur, dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini tahap proyeksi dan perkiraan dilakukan oleh pemerintah untuk menyusun langkah guna mengantisipasi masalah yang akan terjadi dimasa depan. Dengan dilakukannya tahap proyeksi dan perkiraan ini pemerintah juga dapat memperkirakan bagaimana dampak panjang maupun pendek dalam pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan untuk masyarakat.

Dari wawancara yang telah dilakukan di Dinas BAPPEDA pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

*“Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur terdapat perkiraan jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam proses pembangunan infrastruktur jangka pendek, dari kegiatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dalam perkiraan jangka panjang dengan adanya perencanaan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup untuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.”*

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan telah dilakukan peneliti menemukan, perkiraan jangka pendek pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam program pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dampak jangka pendek dari segi lingkungan yang diperkirakan, dengan adanya penebangan pohon yang dilakukan akan berakibat pada kondisi sekitar perkotaan Bojonegoro menjadi lebih panas maka dari itu untuk mengantisipasi masalah yang akan muncu tersebut, pemerintah akan melakukan penanaman kembali setelah penebangan pohon dilakukan, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi awal sebelum penebangan dilakukan. Perkiraan jangka panjang pemerintah diharapkan dari pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah juga harus memperkirakan apakah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan menuai masalah dikemudian hari atau tidak. Sejauh ini dalam pembangunan Infrastruktur trotoar dan drainase yang telah dilakukan, menuai pro dan kontra dari masyarakat mulai dari pembangunan trotoar dan drainase yang terkena atau berdekatan dengan pemukiman dan tanah beberapa masyarakat, dan juga penebangan pohon yang dilakukan untuk membangun trotoar dan drainase ini tidak sedikit menuai kontra dari masyarakat, dikarenakan jalan yang semula rindang dan sejuk menjadi panas untuk dilewati.

Dengan adanya masalah tersebut pemerintah melakukan negosiasi atau penjelasan mengapa pembauatan trotoar atau drainase harus dilakukan dan bagaimana proses yang dilakukan pemerintah dalam membangun trotoar dan drainase tersebut bersama masyarakat yang ada disekitarnya dan pemerintah juga melakukan penanaman pohon kembali agar kawasan perkotaan menjadi rindang kembali.

#### **4. Pengembangan Alternatif**

Pada perencanaan pembangunan pengembangan alternatif merupakan tahapan sangat penting dilakukan karena dengan adanya tahap pengembangan alternatif ini memeberikan pengaruh terhadap kualitas keputusan akhir yang akan diambil, pengembangan alternatif dilakukan karena agar suatu keputusan lebih objektif untuk dilakukan.

Dalam tahap ini, dari beberapa masalah yang ditemukan pemerintah menemukan alternatif yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Dari alternatif yang telah ditemukan diperlukan sebuah pengembangan agar alternatif tersebut lebih maksimal dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dari wawancara yang telah dilakukan di BAPPEDA pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

*“Dalam mewujudkan perencanaan infrastruktur yang baik, proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang mempunyai peran dan menguasai program yang akan dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Seperti halnya dalam program pembangunan trotoar dan drainase dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.”*

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pemerintah Kabupaten Bojonegoro menemukan alternatif yang akan dilakukan dalam mengatasi beberapa masalah yang timbul dikawasan perkotaan Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan menemukan alternatif perbaikan atau pengaspalan jalan dan pembangunan trotoar dan drainase. Dari alternatif yang telah ditemukan maka pemerintah selanjutnya melakukan pengembangan dari beberapa alternatif yang telah ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tahap pengembangan alternatif di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan cara memutuskan apa saja langkah atau apa saja prosedur yang akan dilakukan dalam melaksanakan program tersebut dengan melihat data dari kebijakan tersebut, kemudian memenetapkan kemungkinan-kemungkinan atau penentu dari kebijakan, serta memilih tehnik yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.

Seerti yang kita ketahui bahwa proses pembangunan infrastruktur harus melibatkan atau berkolaborasi dari berbagai pihak lain, peran dari Organisasi Perangkat Daerah sangat penting untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur dengan baik, terdapat banyak Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro dari banyaknya OPD ini mempunyai tugas atau peran masing-masing.

Dan pada tahap pengembangan alternatif ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dengan adanya keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah ini maka pengembangan alternatif dapat mengambil keputusan yang akan dipilih dalam menentukan rencana apa yang akan dilakukan dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro. Seperti program pembangunan perbaikan atau pengaspalan jalan baik dipedesaan ataupun dikawasan perkotaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang dan program pembangunan trotoar dan drainase dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.

## **5. Analisis Kelayakan**

Dalam perencanaan pembangunan tahapan analisis kelayakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan, guna mengetahui apakah alternatif yang dilakukan pemerintah layak dilakukan atau tidak, apakah dapat mencapai tujuan, apakah dapat menyelesaikan masalah yang terjadi atau tidak.

Analisis kelayakan untuk menganalisis apakah ada hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam alternatif program yang akan dilakukan. Sama seperti pengembangan alternatif pada tahap analisis kelayakan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing program yang akan dilakukan.

Dari wawancara yang telah dilakukan di BAPPEDA pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

*“Dalam mewujudkan perencanaan infrastruktur yang baik, maka tahap analisis kelayakan sangat penting untuk dilakukan seperti halnya tahap pengembangan alternatif, pada tahap analisis kelayakan ini juga harus berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang mempunyai peran dan menguasai program yang akan dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya kerjasama dari Organisasi Perangkat Daerah ini pemerintah dapat mengetahui hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro. Dalam tahap analisis kelayakan ini melihat dari aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek teknis.”*

Dalam tahap analisis kelayakan ini, di Kabupaten Bojonegoro tahap analisis kelayakan ini dilakukan dengan melihat dari 3 aspek yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek teknis. Dalam kelayakan program yang dilakukan dalam aspek ekonomi telah sesuai dari tujuan kelayakan program yang telah dilakukan yaitu program ini telah sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat dari segi ekonomi dengan cara program pembangunan Maliogoro yang telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak hanya berdagang di Maliogoro juga terdapat delman dan juga terdapat live musik yang digelar oleh masyarakat. Dalam kelayakan program yang dilakukan dalam aspek lingkungan, pada proses pembangunan trotoar dan drainase pemerintah melakukan penebangan pohon guna memperlancar pembangunan tersebut dalam aspek lingkungan ini pemerintah memiliki hambatan yang terjadi yaitu banyak terjadi keluhan masyarakat terhadap pemerintah karena menebang pohon disekitar jalan perkotaan dan mengakibatkan kawasan jalan menjadi lebih panas. Dengan adanya keluhan tersebut pemerintah memberikan keterangan dan pengertian terhadap masyarakat bahwa setelah pembangunan trotoar dan drainase pohon yang semula ditebang akan kembali ditanam dengan pohon baru untuk mengembalikan kondisi sekitar jalan di kawasan perkotaan Bojonegoro kembali menjadi semula. Pada aspek teknis ini pemerintah telah mendukung kelayakan infrastruktur fisik yaitu dengan terlaksanakannya program pembangunan trotoar pemerintah juga menyediakan beberapa kursi disekitar kawasan kota Bojonegoro agar masyarakat bisa menikmati keindahan kota bojonegoro dimalam hari.

### **Kebijakan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang Berdampak pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bojonegoro.**

Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan memiliki dampak yang penting bagi kehidupan manusia begitu juga sebaliknya, karena lingkungan hidup berperan penting bagi hidup manusia. Pelaksanaan pembangunan selalu memiliki konsekuensi terhadap kondisi alam, Ketika lingkungan mengalami kondisi kerusakan maka keberlangsungan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan juga terancam (Khairunisa et al., 2023).

Dalam kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur terdapat beberapa dampak yang terjadi, salah satunya yaitu dampak yang terjadi pada lingkungan. Dampak pada lingkungan harus sangat diperhatikan karena dengan adanya pembangunan infrastruktur ini dapat berdampak dengan kerusakan lingkungan dan ketahanan ekosistem lingkungan yang telah tersedia.

Dari wawancara yang telah dilakukan di BAPPEDA pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

*”Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memperhatikan masalah lingkungan apalagi pembangunan harus berkelanjutan dan harus sesuai dengan visi misi. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan lingkungan, banyak program yang dilaksanakan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dapat dikaitkan dengan kondisi bojonegoro yang kekurangan air dan banjir disaat curah hujan sedang tinggi, program yang dilakukan DLH yang dilakukan yaitu konservasi dan penanaman pohon”*

Dalam mewujudkan pembangunan yang harus berkelanjutan untuk kedepannya, perencanaan pembangunan harus sesuai dengan visi misi yang sudah tertera pada dokumen RPJMD Bojonegoro yang berisi *“Visi : Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing”* dan untuk menunjang visi diperlukan adanya beberapa misi, pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 7 misi yang salah satunya memiliki keterkaitan dengan pembangunan lingkungan yaitu *“Misi : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan”*.

Hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada bidang Tata Lingkungan, bahwa:

*“Pembangunan Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap lingkungan, seperti halnya pohon yang ditebang untuk melancarkan pembangunan infrastruktur ini berpengaruh terhadap RTH kita yang semakin menurun terutama RTH disepanjang jalan. Dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penghijauan dalam rangka rehabilitasi dan konservasi yang biasanya didaerah yang kritis di area yang sudah mulai gundul ditanami kembali”*

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai banyak program yang telah dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kondisi bojonegoro yang cukup kering, kekurangan air dan juga sering terjadinya banjir dikala curah hujan sedang tinggi salah satu program yang dilaksanakan adalah konservasi, dan program penanaman pohon. Konservasi ini dilakukan dengan mendirikannya Embung dengan ukuran 20m x 40m, dengan adanya konservasi ini diharapkan dapat membantu untuk area penyediaan air tanah. Dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan terdapat beberapa tolak ukur yang harus dilakukan salah satunya yaitu pembangunan harus dilakukan tanpa adanya kerusakan lingkungan (*Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bojonegoro, n.d.*).

Perkembangan dalam pembangunan infrastruktur yang sangat pesat diprediksi telah mengakibatkan berkurangnya jumlah proporsi RTH, dengan semakin berkurangnya proporsi RTH dapat menyebabkan keseimbangan dan kualitas ekologis lingkungan yang tidak terjaga, untuk mengembalikan kualitas dan keseimbangan ekologis maka pemerintah dapat melakukan dengan membangun ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan (Pratama et al., 2022).

Dalam kebijakan perencanaan di Kabupaten Bojonegoro khususnya pada kebijakan program pembangunan infrastruktur trotoar dan drainase memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan salah satunya dampak pada ruang terbuka hijau atau RTH. Dalam pembangunan trotoar dan drainase yang dilakukan, mengakibatkan beberapa pohon harus ditebang dengan ditebangnya banyak pohon dikawasan perkotaan bojonegoro memiliki dampak yang sangat kental mulai dari yang semula kawasan perkotaan rindang banyak pepohonan menjadi lebih panas dan menjadikan ruang terbuka hijau atau RTH menjadi lebih berkurang.

Dikutip dari web Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di upload tahun 2020, pada tahun 2019 pemerintah Bojonegoro telah mempunyai RTH yang berupa pembangunan taman sekitar 10.3 hektar, yang berupa 24 taman yang berada di perkotaan dan kecamatan yang terdiri dari 17 taman dibangun pada bidang tegak lurus dan 7 taman baru yaitu taman Lokomotif, taman Bunderan Jetak, Taman depan Polres dan taman di daerah Pendopo. Dinas Lingkungan Hidup juga telah menanam sebanyak 49.000 pohon yang kebanyakan ditanam pada jalan Nasional antar Kecamatan dan antar Desa, pernyataan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bojonegoro mengatakan tahun 2019 dari target ruang terbuka hijau atau RTH publik dan privat diwilayah perkotaan yang tercantum dalam undang-undang sebanyak 30%, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi sekitar 17%.

Tahun 2020 pemerintah Bojonegoro melakukan pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH kembali sebanyak 6 taman salah satunya terletak pada Stadion Letjen Soedirman dan Dinas Lingkungan Hidup juga ikut serta dengan menyiapkan 120.000 pohon yang akan ditanam, pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH pada tahun 2020 ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap pemenuhan target ruang terbuka publik maupun privat sebanyak 30% dapat tercapai atau terpenuhi pada tahun 2021.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya RTH sangatlah penting sebab RTH selain memperindah kota, adanya RTH juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan, adanya RTH diharapkan panas dapat berkurang dan udara sejuk dapat dirasakan serta dapat mengurangi polusi udara dan mengatur iklim di sekitar kawasan Kabupaten Bojonegoro (Afifah, 2021).

Sampai dengan tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki sebanyak 14 ruang terbuka hijau atau RTH yang terbagi menjadi 3 kawasan (*Paparan Linsek Bupati Jakarta, 20 Desember 2022, 2022*):

**Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs  
(Pilar Pembangunan Lingkungan) di Kabupaten Bojonegoro**

37

Tabel 1. Data Bentuk RTH dan Luasnya di Kabupaten Bojonegoro  
(Sesuai Permen ATR No.14 Tahun 2022)

1No	Bentuk RTH	Luas RTH (Dalam Ha)	Bobot (Dalam %)	Faktor Hijau Biru Indonesia (Koefisien)	Indeks Hijau Biru Indonesia
<b>A</b>					
Kawasan untuk Zona RTH					
1	Rimba kota	21,19	100	3	63,58
2	Taman Kecamatan	23,49	100	2	46,98
3	Taman Kota	8,21	100	2,5	20,52
4	Pemukaman	34,01	100	1,3	44,21
5	Jalur Hijau	17,42	100	1,5	26,13
<b>B</b>					
Kawasan untuk Zona Lainnya					
1	Kawasan perlindungan Setempat	101,75	50	1	50,88
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1949,48	15	1	292,42
3	Kawasan Taman Pangan	6556,70	10	1	655,67
4	Kawasan Hortikultura	36,52	10	1	3,65
<b>C</b>					
Objek Ruang Berfungsi RTH					
1	Persil pada Kawasan / zona Perumahan	313,45	100	1	313,45
2	Persil pada Kawasan / zona Perdagangan dan jasa	61,80	100	1	61,80
3	Persil pada Kawasan / zona Perkantoran	5,06	100	1	5,06
4	Persil pada Kawasan / zona Industri	19,89	100	1	19,89
5	Sungai	216,51	20	1	43,30
<b>TOTAL INDEKS</b>					<b>1.647,55 Ha</b>

Mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) pada pilar pembangunan lingkungan yang menyatakan bahwa dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang didalamnya terdapat pernyataan target RTH disetiap kota adalah 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dengan wilayah di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR perkotaan seluas 13.225,77 Ha dan RTH seluas 1.647,55 Ha, maka proporsi ruang terbuka hijau yang tersedia di Kabupaten Bojonegoro sebanyak:

$$\text{RUMUS : } RTP = \frac{\text{RTH}}{\text{LP}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{TOTAL RTH : } RTP &= \frac{1.647,55}{13.225,77} \times 100 \\ &= 12,457,1197 \\ &= 12,46 \end{aligned}$$

Keterangan :

RTP : Ruang Terbuka Perkotaan

RTH : Ruang Terbuka Hijau (dalam Ha)

LP : Luas Lahan Terbangun di Perkotaan (dalam Ha)

Berdasarkan hitungan RTH, proporsi RTH di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 ini mencapai 12,46% dari batas minimal sebesar 30%. Maka dilihat dari data ruang terbuka yang telah dicantumkan dengan adanya 14 RTH di Kabupaten Bojonegoro tersebut belum bisa memenuhi target minimal yang tercantum dalam undang-undang No 26 Tahun 2007. Sampai saat ini telah terjadi penurunan RTH dikawasan perkotaan, dengan menurunnya RTH ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan menjadikan cuaca panas semakin dirasa mencekam dikawasan perkotaan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan RTH di Bojonegoro mengalami penurunan yang semula tahun 2019 sekitar 17% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 12,46%. Menurunnya ketersediaan RTH di Bojonegoro ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengembangan atau pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dikawasan Kabupaten Bojonegoro, yang meliputi pembangunan atau perbaikan jalan, pembangunan trotoar dan drainase dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan infratraktur yang terus meningkat maka berdampak pada proporsi ruang terbuka hijau dan kualitas lingkungan yang terus menurun.

Menurut Hall & Pfeiffer, 2013; Jazuli, 2015 menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting untuk dilakukan karena selain memberikan keseimbangan pada aspek lingkungan, juga mempengaruhi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Akibatnya, pembangunan berwawasan lingkungan dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat, menjaga kelestarian fungsi, dan keseimbangan lingkungan merupakan indikator utama keberhasilan keberlanjutan. (Cahyani & Aji, 2018)

Adanya ruang terbuka hijau atau RTH jalan sangatlah penting di setiap kawasan perkotaan, seperti ruang terbuka hijau jalan berbentuk pepohonan, tanaman perdu yang ditanam pada pinggir jalan raya. Dengan kebijakan pembangunan infrastruktur khususnya pada pembangunan trotoar dan drainase menjadikan pepohonan disekitar jalan banyak ditebang demi keberlangsungannya pembangunan ini. Setelah selesai pembangunan trotoar dan drainase pemerintah melakukan penanaman pohon kembali untuk mengembalikan keindahan dan kerindangan kawasan sekitar jalan kota Bojonegoro. Total terdapat 2.442 pohon yang ditanam pada tahun 2022 dengan rincian 1.868 pohon Tabebuaya dan 574 pohon Pule yang ditanam pada 12 ruas trotoar, sementara itu pada tahun 2023 pemerintah merencanakan penanaman pohon sebanyak 587 di lima ruas trotoar dengan rincian 432 pohon Tabebuaya dan 155 pohon Pule (Tahun 2023, 587 Pohon Peneduh Ditanam Di Ruas Trotoar Bojonegoro, n.d.)

Selain penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan perencanaan beberapa pembangunan RTH diharapkan dari pembangunan RTH ini dapat menjadikan kawasan di Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih rindang, nyaman, kualitas udara yang membaik, kualitas lingkungan yang baik dan adanya pembangunan RTH juga diharapkan dapat memenuhi syarat atau batas minimal RTH pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada ruang terbuka hijau atau (RTH), dapat disimpulkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur sangat berdampak pada lingkungan khususnya pada ketersediaan ruang terbuka hijau yang semakin berkurang, yang semula ketersediaan ruang terbuka hijau pada tahun 2019 sekitar sebanyak 17% akan tetapi pada saat ini pada tahun 2023 ketersediaan proporsi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bojonegoro menurun menjadi 12,46%, ketersediaan proporsi ruang terbuka hijau yang semakin berkurang akibat kebijakan infrastruktur yang semakin meningkat di Kabupaten Bojonegoro. Dengan berkurangnya proporsi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bojonegoro maka ketersediaan proporsi ruang terbuka hijau belum memenuhi batas minimal proporsi ruang terbuka hijau yang tertera pada Undang-undang No. 26 tahun 2007 yang tertera proposi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan minimal. sebanyak 30%. Dengan adanya penurunan proporsi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bojonegoro pemerintah melakukan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon-pohon guna mengembalikan kualitas lingkungan dan untuk pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau atau RTH yang sesuai dengan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. (2021). Situs Resmi Pemkab Bojonegoro. In *Pemkab Bojonegoro*.  
<https://bojonegorokab.go.id/berita/6806/pemkab-bojonegoro-gelar-expo-umkm-untuk-pulihkan-ekonomi-lokal%0Ahttps://bojonegorokab.go.id/berita/6042/program-aladin-pemkab-bojonegoro-targetkan-3924-unit-rumah-dibangun-tahun-2021>
- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 10.  
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.95>
- Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bojonegoro*. (n.d.).  
<https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/11>
- Bappenas. (2020). Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan. In *Kementerian PPN/Bappenas*.
- Cahyani, S. D., & Aji, R. S. (2018). Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 115–128. <https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692> Jakarta, 20 Desember 2022. (2022).
- Khairunisa, D. F., Ardelia, H. M., Alamsyah, D., & Handesty, A. (2023). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) di Kota Pontianak*. 7, 27725–27730.
- Pembangunan, P., Tanaman, P., & Kabupaten, P. (2017). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP )*. 3(1), 51–61.
- Pemda Bojonegoro. (n.d.). *Perubahan RPJMD 2018-2023 Final (PERDA No. 1/2022)* (p. 2022).
- Pratama, I. A., Izharshyah, J. R., & Putri, H. M. (2022). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan ( JAPK ) Volume 2 , Nomor 1 , Juni 2022 ISSN 2807-6729 ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH ) DI KOTA MEDAN*. 2, 1–12.
- Rofi, M. N., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Salsabila, L., & Anggraina, D. (2022). *Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) di Kota Depok*. 22(02), 39–45.